PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KELAS II



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KELAS II

JL. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Sanggau
Website www.pn-sanggau.go.id
Telp. (0564) 21191 – 21443 Email info@pn-sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 56/SEK.PT.W17-U/OT1.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban akuntabilitas.

Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegamg teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 kami mengucapkan terimakasih kepada unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau dan seluruh pegawai yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024.

Sanggau, 6 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah sistem akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sanggau ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mensyaratkan tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan bagi kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan kinerja kami dalam satu tahun. Keberhasilan tersebut tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan kami sebagai satuan kerja Pengadilan Negeri Sanggau namun juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat secara umum. Mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Sanggau yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama instansi Pengadilan Negeri Sanggau.

Namun demikian selain keberhasilan yang telah kami raih, Pengadilan Negeri Sanggau juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan Peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat pencari keadilan juga menunjukkan adanya kekurang sempurnaan kami dalam menjalankan tugas. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran karyawan/ karyawati Pengadilan Negeri Sanggau untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan kelak dapat memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan instansi Pengadilan Negeri Sanggau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN 2

BAB II 3

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 3

A. RENCANA STRATEGIS 3

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 12

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 15

BAB III 17

AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17

1. Analisis Capaian Kinerja 20

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 21

3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Kinerja Jangka Menengah 22

4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja (Benchmark) di Level Nasional 23

5. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Capaian Kinerja tahun 2024.....24

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....24

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....25

B. REALISASI ANGGARAN.....42

1. Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi.....39

2. Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....43

BAB IV.....41

KESIMPULAN DAN SARANA.....44

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Sanggau terutama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu langkah – langkah dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan bagi segenap aparat Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2024.

Bahwa langkah-langkah dan kebijaksanaan tersebut perlu disusun dalam suatu Laporan Kinerja yang akan dijadikan sebagai suatu pedoman kerja bagi segenap aparat dan atau pegawai Pengadilan Negeri Sanggau, agar kinerja mereka dapat terlaksana secara terarah, tepat sasaran, efektif dan efisien sebagai bagian dari fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh pimpinan Pengadilan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau merupakan pedoman dan petunjuk bagi para pejabat dan segenap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pokok, tugas-tugas di bidang Kepaniteraan, bidang Kesekretariatan, bidang Pembinaan/ Pengawasan ataupun bidang – bidang lainnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya, di bidang hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Fungsi :

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara/ sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.48 tahun 2009.
2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Sanggau.
3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek dan strategi Pengadilan Negeri Sanggau, Tugas Pokok dan Fungsi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis 2020 – 2024, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau

Visi Pengadilan Negeri Sanggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGGAU YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sanggau mengemban misi adalah sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarian peradilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sanggau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung*

   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung*

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

c. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum*

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sanggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

   1) Layanan Pos Bantuan Hukum;
   2) Penyelesaian Perkara Peradilan Umum ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu;
   3) Penyelesaian Perkara Peradilan Umum melalui Pembebasan Biaya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 720/ KPN.OT1.6/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2020 - 2024 bertujuan meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan Sasaran Strategis sebagai berikut:

a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan;
d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel :
   a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
   b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu;
   c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
   d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
   e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
   f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi;
   g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara :
   a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
   b. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
   c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan :
   a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
   b. Persentase perkara yang diselesaikan diLuar Gedung Pengadilan;
   c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan :
   Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.2.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ x 100% **Catatan :** • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Memgajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang diayatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelauyanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus >_80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi } \textit{dan} \text{ dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim}}$ x 100% **Catatan :** • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dsn Petikan Putusan. • Jumlah putusan Jumlah adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para puhak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian(putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang ~~masuk~~ terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara } \textit{yang diajukan secara} \text{ Prodeo}}$ x 100% **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang Harus Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sanggau menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorstif	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		b. Persentase salinan putusan yang perkara Pidana disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%

			Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaiakn diluar Gedung Pengadilan (Zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah } \textit{permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan nonexcutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi uang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau

Sanggau, 6 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Adapun rencana kinerja tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	164 Perkara	166.050.000	
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%				386 Perkara		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%				2 Perkara		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi	 95% 95%		Penyelesaian Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi	325 Perkara 325 Perkara		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%		Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Perkara		

		f. Survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		Survei Layanan Peradilan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	121 IKM		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	541 Perkara		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%		Mediasi	Jumlah perkara mediasi	24 Perkara		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	3 Perkara	670.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%		Sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	13 Perkara	32.121.000	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	44 Jam Layanan	44.000.000	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 Perkara	-	

Rencana Kinerja Tahun 2024

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.413.228.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	244.341.000

Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sanggau dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja
Pengadilan Negeri Sanggau
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	99,39	104,62
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	103,76	109,22
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	100	2,00
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95	76,50	80,53
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	82,69	87,04
		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5	33,33	666,66

		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	94,89	118,61
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99	100	101,01
		b. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99	100	101,01
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	8,33	416,66
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	5	0	0

Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja
Pengadilan Negeri Sanggau
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	99,21%	99,39%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	1,060%	103,76%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	97,92%	76,50%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93,01%	82,69%
		f. Persentase perkara pidana anak yang	0%	33,33%

		diselesaikan dengan diversi		
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,48%	94,89%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	101,01%
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	101,01%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15,78%	8,33%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yag Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%	0%

Rekapitulasi Perkara
Pengadilan Negeri Sanggau
Januari s/d Desember 2024

No	Perkara	Sisa 2023	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi
1	Pidana Biasa	56	349	362	89%	43	120	86			
2	Pra Peradilan	0	2	3	150%	1					
3	Pidana Singkat										
4	Pidana Cepat		9	9	100%						
5	Pidana Lalu Lintas		684	684	100%						
6	Pidana Anak		12	12	100%		1	1			
7	Gugatan	10	70	68	85%	12	8	8			
8	Permohonan	2	89	90	99%	1					
9	Gugatan Sederhana										
Total		**68**	**1215**	**1228**	**96%**	**57**	**129**	**95**	**0**	**0**	**0**
Total *) selain Pidana Lalu Lintas		**68**	**531**	**544**	**91%**	**57**	**129**	**95**	**0**	**0**	**0**

Data per 31 Desember 2024

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja dapat dilihat, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran strategis dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau terbagi dalam enam indikator kinerja antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASI
a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	99,39%	104,62%
b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	103,76%	109,22%
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	100,00%	2,00%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95%	76,50%	80,53%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	82,69%	87,04%
f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	33,33%	666,60%
g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan perdilan	80%	94,89%	118,61%

a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ \ Perkara\ yang\ diselesaikan} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{164}{165} \text{ x } 100\% \ = 99{,}39\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 99,39%* dan mencapai *target yang telah ditetapkan sebesar 95%* dengan *persentase capaian sebesar 104,62%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik disebabkan diantaranya oleh Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau dilaksanakan menggunakan e-court sehingga perkara dapat lebih cepat diselesaikan.

b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{386}{372} \text{ x } 100\% = 103{,}76\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 103,76%* dan mencapai *target yang telah ditetapkan sebesar 95%* dengan *persentase capaian sebesar 109,22%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik disebabkan diantaranya karena perbandingan pembagian perkara antara majelis hakim dan perkara yang masuk telah dilaksanakan dengan baik serta adanya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan pimpinan melalui aplikasi secara rutin melalui Aplikasi MIS.

c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan\ dengan\ restoratif}{Perkara\ yang\ diajukan\ untuk\ restoratif} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoaratif pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 100%* dan mencapai *target yang telah ditetapkan sebesar 5%* dengan *persentase capaian sebesar 2,00%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dikarenakan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum terhadap pentingnya penyelesaian perkara melalui *Restoratif Justice.*

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum\ banding}{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{549 - 129}{549} \text{ x } 100\% = 76{,}50\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Banding pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 76,50%* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95%* dengan *persentase capaian sebesar 80,53%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut tidak dapat tercapai dengan baik dikarenakan seiring dengan keterbukan informasi dan akses pelayanan publik yang semakin meningkat sehingga pada pencari keadilan dapat lebih mudah dalam mengajukan upaya hukum.

e. Persentase perkara yang Tidak Mngajukan Upaya Hukum Kasasi.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum\ kasasi}{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{549 - 95}{549} \text{ x } 100\% = 82{,}69\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Kasasi pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 82,69%* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95%* dengan *persentase capaian sebesar 87,04%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut tidak dapat tercapai dengan baik dikarenakan seiring dengan keterbukaan informasi dan akses pelayanan publik yang semakin meningkat sehingga pada pencari keadilan dapat lebih mudah dalam mengajukan upaya hukum.

f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ diversi\ yang\ dinyatakan\ berhasil}{Jumlah\ Perkara\ diversi} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{1}{3} \text{ x } 100\% = 33{,}33\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 33,33% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5% dengan persentase capaian sebesar 666,6%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase anak yang diselesaikan dengan diversi dilihat anomali disebabkan oleh penetapan target yang kecil, mengingat perkara diversi sangat dipengaruhi oleh entitas eksternal.

g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Sanggau dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sanggau sebesar 94,89% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26 s/d 100,00). Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

NO	Ruang Lingkup	Rata Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	**Persyaratan**	3,806	Sangat Baik	3
2	**Perilaku Pelaksana**	3,677	Sangat Baik	7
3	**Prosedur**	3,742	Sangat Baik	5
4	**Kompetensi Pelaksana**	3,806	Sangat Baik	3
5	**Penanganan Pengaduan**	3,774	Sangat Baik	4
6	**Waktu Pelayanan**	3,774	Sangat Baik	4
7	**Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**	3,871	Sangat Baik	2
8	**Biaya/Tarif**	3,710	Sangat Baik	6
9	**Maklumat Pelayanan**	4,000	Sangat Baik	1

Berdasarkan perhitungan diatas, index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan *terealisasi sebesar 94,89%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80%* dengan *persentase capaian sebesar 118,61%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan namun hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan PN Sanggau.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau terbagi dalam empat indikator kinerja antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase salianan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%	100,00%	101,01%
b. Persentase salianan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99%	100,00%	101,01%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	4,16%	208,33%

a. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

$$= \frac{Jumlah\ Salinan\ Putusan\ yang\ diminutasi\ dan\ dikirim\ \ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ putusan\ \sout{keseluruhan\ yang\ diminutasi/dikirim}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{164}{164} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktupada tahun 2024 *terealisasi sebesar 100%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 99%* dengan *persentase capaian sebesar 101,01%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau telah seluruhnya diupload aplikasi E-Court sehingga penyampaian salinan putusan dilakukan secara online.

b. Persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

$$= \frac{Jumlah\ Salinan\ Putusan\ yang\ diminutasi\ dan\ dikirim\ \ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ putusan\ \sout{keseluruhan\ yang\ diminutasi/dikirim}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{386}{386} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 100%*

dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 99%* dengan *persentase capaian sebesar 101,01%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau telah seluruhnya diupload aplikasi E-Berpadu sehingga penyampaian salinan putusan dilakukan secara online.

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ Mediasi\ berhasil}{Jumlah\ perkara\ yang\ dilakukan\ mediasi} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{1}{24} \text{ x } 100\% = 4{,}16\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 4,16%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2%* dengan *persentase capaian sebesar 208,33%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dilihat anomali disebabkan oleh penetapan target yang kecil, mengingat perkara mediasi sangat dipengaruhi oleh entitas eksternal.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran strategis dalam Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Sanggau terbagi dalam tiga indikator kinerja antara lain :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ Prodeo\ yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Perkara\ yang\ diajukan\ secara\ Prodeo} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 100%* dan *mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%* dengan *persentase capaian sebesar 100%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau dapat memaksimalkan anggaran prodeo yang telah diberikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

$$= \frac{Jumlah\ Perkara\ \ yang\ Diselesaikan\ diluar\ Gedung\ Pengadilan}{Jml\ Perkara\ yg\ diajukan\ Diselesaikan\ diluar\ Gedung\ Pengadilan} \times 100\%$$

$$= \frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat ditargetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sanggau telah menyelesaikan seluruh perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatz dan diselesaikan secara zetting plaat. Perkara yang diselesaikan secara zetting plaat antara lain perkara pidana cepat/tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, *persentase capaian sebesar 100%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau dapat memaksimalkan anggaran yang telah diberikan.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

$$= \frac{Jumlah\ Pencari\ Keadilan\ Golongan\ Tertentu\ yang\ Mendapat\ Layanan\ Bantuan\ Hukum}{Jumlah\ permohonan\ layanan\ Hukum} \times 100\%$$

$$= \frac{175}{175} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan Layanan bantuan hukum sebanyak 440 jam layanan atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan *persentase capaian sebesar 100%.*

Adapun terhadap capaian target tersebut dapat tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan (Posbakum) pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau dapat memaksimalkan anggaran yang telah diberikan.

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran strategis dalam Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sanggau dilihat dari indikator kinerja Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5%	0,00%	0%

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

$$= \frac{Jumlah\ eksekusi\ yang\ telah\ selesai\ dilaksanakan}{Jumlah\ permohonan\ eksekusi} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{0}{0}\ x\ 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2024 *terealisasi sebesar 0% (Nihil)* dan *tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5%* dengan *persentase capaian sebesar 0,% (Nihil).*

Adapun terhadap capaian target tersebut tidak tercapai dengan baik dari target yang telah di tetapkan, persentase capaian pada Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sanggau tidak ada permohonan eksekusi dikarenkan tidak ada perkara yang masuk.

2. ANALISIS CAPAIAN KENERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja
Pengadilan Negeri Sanggau
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	h. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	99,21%	99,39%
		i. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	1,060%	103,76%
		j. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	100%
		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	97,92%	76,50%
		l. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93,01%	82,69%
		m. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	33,33%
		n. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,48%	94,89%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%
		e. Persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15,78%	4,16%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yag Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%	X

Persentase Capaian Kinerja yang diselesaikan pada tahun 2024 secara rata-rata telah mencapai target yang ditentukan, hanya pada Capaian Indikator Kinerja Persentase

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi belum mencapai target yang ditentukan. Sedangkan pada Indikator Kinerja yang ditandai dengan tanda (X) tidak dapat dinilai dikarenakan tidak ada atau nihil.

3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Target Kinerja Jangka Menengah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95	100	95	100	-	-	-	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	110,61	95	96,29	-	-	-	-	-	-
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95	78,18	95	79,31	-	-	-	-	-	-
		d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	95	96,26	95	99,21	95	99,39
		e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	95	96,72	95	1,060	95	103,76
		f. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	5	0,8	5	0	5	100

		g.Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	-	-	-	-	95	96,51	95	97,92	95	76,50
		h.Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	-	-	95	92,45	95	93,01	95	82,69
		i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-	-	-	5	0,75	5	0	5	33,33
		j. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	-	-	80	93,89	80	96,48	80	94,89
		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : -Banding -Kasasi -PK	 95 95 95	 84,34 91,19 100	 95 95 95	 81,70 82,92 99,39	 - - -	 - - -	 - - -	 - - -	- - - -	- - - -
		l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5	0	5	0	-	-	-	-	-	-
		m. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	86,89	80	99,77	-	-	-	-	-	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyeles	a.Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99	100	100	100	-	-	-	-	-	-

	aian Perkara	b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	20	5	18,51	-	-	-	-	-	-
		c.Persentase berkas perkaraya ng diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	99	90,40	95	89,83	-	-	-	-	-	-
		d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyaraka t yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99	100	99	100	-	-	-	-	-	-
		e.Persentase salinan putusan Perdata yang disampaik an ke para pihak tepat waktu	-	-	-	-	99	100	99	100	99	100
		f.Persentase salinan putusan Perdata yang disampaik an ke para pihak tepat waktu	-	-	-	-	99	100	99	100	99	100
		g.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	-	-	2	18,75	2	15,78	2	4,16

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0

Sedangkan capaian kinerja pada tahun kedua (2024) dalam Rencana Kinerja Jangka Menengah pada Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024 Dalam Rencana Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	99,39
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	103,76
		Persentase Perkara Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Sanggau	5	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	76,50

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	82,69
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	33,33
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	94,89
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	99	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	4,16
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	X

Persentase Capaian Kinerja yang diselesaikan pada tahun 2024 dalam target Rencana Jangka Menengah secara rata-rata telah mencapai target yang ditentukan, hanya pada Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi belum mencapai target yang ditentukan. Sedangkan pada Indikator Kinerja yang ditandai dengan tanda (X) tidak dapat dinilai dikarenakan tidak ada atau nihil.

4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN REALISASI KINERJA (BENCHMARK) DI LEVEL NASIONAL

Dikutip dari *website menpan.go.id,* Terkait peningkatan nilai rata-rata AKIP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) tahun 2024 kepada instansi pemerintah. Hasilnya, nilai SAKIP pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Menteri Anas mengungkapkan, peningkatan nilai ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil. "Capaian SAKIP dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2014 sampai 2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja," ujar Menteri Anas, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (02/10).

Selama enam tahun sejak 2018, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih predikat AA. Selain daerah yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono X, tahun ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya juga meraih predikat AA.

SAKIP 2024 dievaluasi terhadap 36 pemprov dan 505 pemkab/pemkot. Selain tiga daerah peraih nilai AA, Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih nilai A. Sementara 16 pemda lainnya mendapat nilai BB, serta 39 pemda dengan nilai B. Sisanya, predikat masih dibawah nilai B. Rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 sebesar 64,23, mengalami peningkatan 0,18 poin dari tahun 2023. Sedangkan rata-rata nilai SAKIP pemprov tahun 2024 adalah 70,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari tahun 2023. Penurunan itu disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi.

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA dan A memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya, seperti penurunan angka pengangguran."Rata-rata Pemerintah daerah dengan SAKIP AA dan A mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi dari rata-rata IPM Nasional," jelas Menteri Anas.

Menteri Anas menegaskan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Menteri Anas mengucapkan apresiasi terhadap

pemda yang mendapat kenaikan predikat SAKIP. Harapannya, capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. "Kami menyadari bahwa berbagai pencapaian melalui SAKIP tentu harus terus ditingkatkan di tengah berbagai dinamika dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi," pungkas Menteri Anas.
(Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakip-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan#).

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 73,65 atau BB (sangat baik) meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 72,45 atau BB.

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,45	73,65
Predikat			BB	BB

Dengan demikian nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2023 masih diatas rata-rata nilai AKIP pada kementerian/Lembaga.

Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Pengadilan Negeri Sanggau		Nilai rata-rata pada Kementerian/ Lembaga		Keterangan
	2023	**2024**	2023	**2024**	Nilai AKIP Pengadilan Negeri Sanggau diatas rata-rata nilai pada K/L
	72,45	**73,65**	72,17	**70,75**	

5. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN PENINGKATAN/ PENURUNAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan dalam kinerja merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan dalam mencapai hasil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Sanggau menganalisis dan memetakan faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dan

peningkatan/penurunanan capaian kinerjanya pada tahun 2024 dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024 dalam Rencana Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	99,39%	Meningkat
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	103,76%	Meningkat
		Persentase Perkara Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Sanggau	5	100%	Meningkat
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	76,50%	Tidak Tercapai
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	82,69%	Tidak Tercapai
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	33,33%	Meningkat
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	94,89%	Meningkat
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	99	100%	Tercapai
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	99	100%	Tercapai
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	4,16%	Meningkat

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100%	Tercapai
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100%	Tercapai
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	0	Tidak dapat dihitung

Faktor penyebab peningkatan/ keberhasilan capaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan/Sasaran Kinerja Telah Berorientasi Hasil

   Tujuan/Sasaran Kinerja yang Telah Berorientasi Hasil pada Pengadilan Negeri Sanggau cukup memberikan motivasi bagi seluruh sumber daya manusia yang ada untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya. Untuk itu etos kerja yang telah terbangun ini juga dipengaruhi oleh Tunjangan Kinerja yang telah meningkat pada tahun sebelumnya yang cukup menjadi suatu rangsangan terhadap Pegawai dalam berkerja secara profesional dan akuntabel.

2. Peranan Masyarakat

   Peranan masyarakat memberikan dampak secara tidak langsung pada pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sanggau. Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan peradilan bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.

   Dalam hal pengaduan dapat dilakukan masyarakat secara langsung melalui aplikasi whistle blowing system atau melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI yang dapat diakses oleh masyarakat langsung dengan bantuan jaringan internet.

Faktor penyebab penurunan/ kegagalan capaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Perkara

Pengadilan Negeri Sanggau memiliki wilayah hukum yang cukup luas yang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Setiap tahunnya jumlah perkara Pengadilan Negeri Sanggau mengalami peningkatan baik itu perkara Pidana maupun perkara Perdata sehingga dengan jumlah Hakim dan Pegawai yang tidak banyak dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang cukup berat. Hal ini mempengaruhi turunnya capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Sanggau.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

   Kurangnya sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Sanggau sangat berpengaruh pada capaian kinerja Peradilan. Banyaknya perkara yang masuk tidak diimbangi dengan jumlah personil yang memadai sehingga menyebabkan beban kerja yang tinggi pada Pengadilan Negeri Sanggau.

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Tingkat Efesiensi Capaian Setiap Sasaran per Program

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	% Capaian Terhadap Target	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Terhadap Pagu DIPA
	2024			2024
a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,39	166.050.000	165.386.824	99,60

b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	103,76			
c. Persentase Perkara Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Sanggau	100			
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	76,50			
e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82,69			
f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33			
g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	94.89	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I	84,36	*% Rata-rata Capaian Anggaran*		99,60
Tingkat Efisiensi = 0,84 (efisiensi tidak tercapai)				

Pada Sasaran 1 ini efisiensi anggaran atas kinerja tidak tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 0,84.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	% Capaian Terhadap Target	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Terhadap Pagu DIPA
	2024			2024
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	1.100.000	800.000	72,73
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100			

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,16	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2	68,05	*% Rata-rata Capaian Anggaran*		72,73
Tingkat Efisiensi = 0,68 (efisiensi tidak tercapai)				

Pada Sasaran 2 ini efisiensi anggaran atas kinerja tidak tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 0,71. Hal ini dikarenakan sasaran tidak tercapai sesuai target. Pada tahun selanjutnya perlu diprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	% Capaian Terhadap Target	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Terhadap Pagu DIPA
	2024			2024
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	670.000	604.000	90,15
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100	32.121.000	32.100.000	99,93
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	44.000.000	44.000.000	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3	100	*% Rata-rata Capaian Anggaran*		96,69
Tingkat Efisiensi = 1 (efisiensi tercapai)				

Pada Sasaran 3 ini efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	% Capaian Terhadap Target	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Terhadap Pagu DIPA
	2023			2023
Persentase Putusan Perkara Perdata yag Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0	-	-	-
% Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4	0	*% Rata-rata Capaian Anggaran*		-
Tingkat Efisiensi = (tidak dapat di analisis)				

Pada Sasaran 4 ini efisiensi anggaran atas kinerja tidak dapat dianalisis. Hal ini dikarenakan sasaran tercapai sesuai target namun dilaksanakan tanpa anggaran yang terdapat di DIPA.

Penggunaan sumber daya pada Pengadilan Negeri Sanggau telah dilakukan secara efektif dan efisien baik dalam penggunaan sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya banyak sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Negeri Sanggau yang melaksanakan tugas ganda atau rangkap jabatan, seperti Jurusita yang merangkap sebagai staf hukum, Jabatan Fungsional yang merangkap staf perencanaan dan masih banyak lagi tugas-tugas lainnya.

Dalam penggunaan anggaran Pengadilan Negeri Sanggau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang baik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dan DIPA 03, setiap pembiayaan telah dilaksanakan sesuai pos-pos yang dianggarkan.

Sedangkan dalam pengunaan sarana dan prasarana yang ada Pengadilan Negeri Sanggau telah efisien atau sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program penunjang sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2024 adalah program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- Perkara yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Kalimantan Barat;
- Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);

- Pelaksanaan Eksekusi;
- Serta Survei Layanan Peradilan.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Perkara yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Capaian Keuangan
1.	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	164 perkara	165 perkara	Rp.166.050.000	99,60%
2.	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	372 perkara	386 perkara		
3.	Jumlah Perkara Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Sanggau	2 perkara	2 perkara		
4.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	249 perkara	172 perkara		
5.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	249 perkara	194 perkara		
6.	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	3 perkara	1 perkara		
7.	Jumlah Salinan Putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	130 perkara	106 perkara		
8.	Jumlah Salinan Putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	386 perkara	386 perkara		
9.	Jumlah Perkara	24 perkara	1 perkara		

	yang diselesaikan melalui mediasi berhasil.				

Indikator kinerja kegiatan layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Capaian Keuangan
1.	Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	51 orang	175 orang	Rp 44.000.000	100%

Indikator kinerja kegiatan pelaksanaan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Capaian Keuangan
1.	Jumlah pelaksanaan Eksekusi	0 Perkara	0 Perkara	-	-

Indikator kinerja kegiatan Survei layanan peradilan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Capaian Keuangan
1.	Survei Layanan Peradilan	80 (IKM)	94,89%	-	100%

Faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan ini adalah adanya anggaran yang tersedia melalui Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang pada DIPA 01 (BUA) maupun DIPA 03 (BADILUM), pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan masyarakat dalam memberikan penilaian yang jujur guna peningkatan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi para pengguna peradilan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sanggau mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan Total Realisasi Anggaran Pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.4.535.605.518,00 *(Empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus delapan belas rupiah)* dari total Pagu Anggaran

sebesar Rp.4.657.569.000,00 *(Empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)* dengan persentase realisasi total sebesar 97,38%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	DIPA	PAGU (RP)	Realisasi		Sisa	
			(RP)	%	(RP)	%
1	Badan Urusan Administrasi	4.413.228.000	4.292.066.694	97,25%	121.161.306	2,75%
2	Badan Peradilan Umum	244.341.000	243.538.824	99,67%	802.176	0,33%
Total		4.657.569.000	4.535.605.518	97,38%	121.963.482	2,62%

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau DIPA Badan Urusan Administrasi digunakan untuk keperluan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sedangkan DIPA Badan Peradilan Umum digunakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Adapun sisa dari pagu anggaran tersebut akan langsung kembali kepada negara.

1. Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi

DIPA Badan Urusan Administrasi untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp.4.413.228.000 *(Empat miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)* dengan realisasi sebesar Rp.4.292.066.694 *(Empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)* dengan persentase realisasi sebesar *97,25%.*

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01
(Badan Urusan Administrasi)

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA PEGAWAI	3.256.958.000	96.85%	3.154.254.630	96,85%
BELANJA BARANG	1.156.270.000	98.40%	1.137.812.064	98.40%
BELANJA MODAL	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	**4.413.228.000**	**97.25%**	**4.292.066.694**	**97,25%**

2. Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp.244.341.000 *(Dua ratus emapat puluh empat juta tiga ratus emapat puluh ribu rupiah)* dengan realisasi sebesar Rp.243.538.824 *(Dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delpn ratus dua puluh emapat rupiah)* dengan persentase realisasi sebesar *99,67%.*

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA BARANG	244.341.000	99.67%	243.538.824	99.67%
TOTAL	**244.341.000**	**99.67%**	**243.538.824**	**99.67%**

Catatan : Dari total Belanja Barang pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat alokasi anggaran **Layanan Pos Bantuan Hukum** Sebesar Rp.44.000.000 *(Empat puluh empat juta rupiah)* dengan realisasi sebesar 100%.

BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, dan LKjIP ini merupakan wujud tranparansi, kredibilitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sanggau sebagai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya.

Secara umum pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2024 mengalami peningkatan meskipun masih terdapat penurunan kinerja di beberapa indikator yang sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal. Penurunan pada beberapa indikator kinerja tersebut ditahun mendatang diharapkan dapat diatasi dengan salah satu cara yaitu menambah jumlah personil pada Pengadilan Negeri Sanggau baik dari Hakim maupun Pegawai, dan hal ini tidak dapat dilakukan sepihak oleh Pengadilan Negeri Sanggau itu sendiri melainkan kebijakan dari pimpinan lembaga Mahkamah Agung RI.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan sarana dan prasarana serta keterampilan para pegawai sangat membantu, untuk itu diharapkan kedepan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta program peningkatan sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024. Pengadilan Negeri Sanggau ini kami susun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Sanggau secara keseluruhan.

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 722/KPN.OT1.6/XII/2024

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 56/SEK.PT.W17-U/OT1.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SANGGAU;
Pertama	:	Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau
Kedua	:	Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau.
Ketiga	:	Tim dalam menjalankan tugas sesuai arahan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau dan Panitera serta Sekretaris maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau
Nomor : 722/KPN.RA1.3/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024
DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Victor Suryadipta, S.H. NIP. 19770106 200112 1 002	Ketua	Penasehat
2.	Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak. NIP. 19850730 200904 1 003	Sekretaris	Koordinator
3.	Ferri Yanuardi, S.H., M.H. NIP. 19850129 200805 1 001	Panitera	Koordinator
4.	Eva Susanti, S.H. NIP. 19780720 201212 2 001	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Warsidik, S.H. NIP. 19721027 199403 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Gatot Sukmanto NIP. 19670616 199003 1 002	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7.	Milawati, SE. NIP. 19791124 200604 2 001	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Nurhazizah NIP. 19700207 199403 2 004	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Khairil Anwar, S.H. NIP. 19830110 200912 1 005	Analis Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002